

Transmigrasi Sebagai Upaya Pertanian

Yudhi Zuriah Wirya Purba, Wardi Saleh

^{1,2}Program Pascasarjana Universitas Sjakhyakirti

Email Correspondence: yudhi.wardi@yahoo.com

Abstract

Implementation of the transmigration program is equity in various aspects of development. The implementation of transmigration which has been characterized as centralized, is now faced with challenges in the form of implementing the principles of decentralization and autonomy. Since the reformation or era of regional autonomy, and the rejection of transmigration in several regions, transmigration as a typical example and an original regional development strategy in Indonesia is basically still a program that is still needed in regions, especially in the context of regional development outside Java Island. In this context, a reorientation of the implementation of the transmigration program is needed, the main thing related to regional development is how to place transmigration settlements/areas so that they can truly be integrated with the surrounding areas as a functional area, so that it does not become an exclusive area. The efforts made in this regard are designing the linkages between the transmigration settlements/areas and the surrounding areas, both physical-spatial, social, economic and cultural linkages. It is hoped that this strong linkage can eliminate various negative stigmas from the transmigration program and at the same time will be able to trigger regional development, especially areas outside Java Island. To support the reorientation of the development of transmigration areas, it is time to develop new concepts and strategies for the development of transmigration areas accompanied by more comprehensive development indicators, both regarding indicators of physical development, economic development, social capital and the environment. Three main obstacles in implementing the transmigration program, namely: structural, in the form of weak organization, apparatus resources related to integration and synchronization, substantial related to the need for transmigration development to participate in strengthening national development even though the budget is limited and operational techniques, which are related to inaccuracy location selection so that the program is less integrated between sectors and between development activities.

Keywords: *Transmigration, Efforts, Agriculture*

Abstrak

Pelaksanaan program transmigrasi adalah pemerataan pada berbagai aspek pengembangan. Penyelenggaraan transmigrasi yang selama ini berciri sentralistik, kini dihadapkan pada tantangan berupa penerapan asas desentralisasi dan otonomi. Sejak reformasi atau era otonomi daerah, dan penolakan transmigrasi di beberapa daerah, transmigrasi sebagai contoh yang khas dan strategi pengembangan wilayah yang original di Indonesia pada dasarnya masih merupakan program yang masih dibutuhkan di daerah-daerah terutama dalam konteks pengembangan wilayah di luar Pulau Jawa.

Dalam konteks tersebut, diperlukan reorientasi pelaksanaan program transmigrasi, yang utama terkait dengan pengembangan wilayah adalah bagaimana menempatkan pemukiman/ kawasan transmigrasi sehingga dapat benar-benar terintegrasi dengan wilayah – wilayah sekitarnya sebagaimana suatu kawasan fungsional, sehingga tidak menjadi kawasan yang bersifat eksklusif. Usaha-usaha yang dilakukan dalam hal ini adalah merancang keterkaitan antara pemukiman/kawasan transmigrasi dengan wilayah-wilayah sekitarnya, baik keterkaitan fisik-spasial, sosial, ekonomi maupun budaya. Keterkaitan yang kuat ini diharapkan dapat mengeliminir berbagai stigma negatif dari program transmigrasi dan sekaligus akan mampu memicu pengembangan wilayah khususnya wilayah-wilayah di luar Pulau Jawa. Untuk mendukung reorientasi pembangunan kawasan transmigrasi, sudah waktunya dikembangkan konsep dan strategi baru pengembangan kawasan transmigrasi disertai dengan indikator-indikator pengembangan yang lebih komprehensif, baik menyangkut indikator perkembangan fisik, perkembangan ekonomi, social capital dan lingkungan. Tiga kendala utama dalam penyelenggaraan program transmigrasi, yaitu: struktural, berupa lemahnya organisasi, sumber daya aparat yang berkaitan dengan integrasi dan sinkronisasi, substansial yang berkaitan dengan kebutuhan agar pembangunan transmigrasi ikut memantapkan pembangunan nasional meskipun anggaran terbatas dan teknis operasional, yang berkaitan dengan kurang tepat pemilihan lokasi sehingga kurang terpadu program antar sektor dan antar kegiatan pembangunan.

Kata Kunci: *Transmigrasi, Upaya, Pertanian*

Pendahuluan

Permulaan penyelenggaraan transmigrasi pada tanggal 12 Desember 1950, pemerintah Indonesia secara resmi melanjutkan program kolonisatie yang telah dirintis pemerintah kolonial Belanda pada tahun 1905 dengan nama yang lebih nasionalis yaitu transmigrasi. Transmigrasi dari bahasa Belanda: *transmigratie* adalah suatu program yang dibuat oleh pemerintah Indonesia untuk memindahkan penduduk dari suatu daerah yang padat penduduk (kota) ke daerah lain (desa) di dalam wilayah Indonesia. Penduduk yang melakukan transmigrasi disebut Transmigran. Pada saat itu, rombongan pertama kolonisasi sebanyak 155 keluarga dari Bagelan, Karesidenan Kedu, dikirim di Gedongtataan, Lampung. Di tempat itulah para pendatang membangun desa pertama yang diberi nama Bagelen, sesuai dengan nama desa asalnya. Dari sinilah dimulainya sejarah ketransmigrasian yang selama satu abad (dihitung dari tahun 1905) ikut membantu perjuangan bangsa (Direktorat Bina Potensi Kawasan Transmigrasi 2015).

Penyelenggaraan transmigrasi yang selama ini berciri sentralistik, kini dihadapkan pada tantangan berupa penerapan asasdesentralisasi dan otonomi. Desentralisasi telah menjadi sumber dari tekanandomestik untuk memperbaharui program transmigrasi. Penerapan otonomi daerah selain menyebabkan pergeseran kewenangan pada penyelenggaraan transmigrasi, juga mengharuskan pelaksanaan transmigrasi sepenuhnya disesuaikan dengan karakteristik dan kondisi spesifik daerah. Pelaksanaan program transmigrasi adalah pemerataan pada berbagai aspek pengembangan, seperti pendidikan, kesehatan, mental spiritual /keagamaan, olah raga, kesenian dan lain lain. Transmigrasi memiliki peran yang sangat penting bagi pembangunan nasional dan transmigran sebagai objek penyelenggaraan transmigrasi telah berkontribusi dalam pengembangan daerah. Tantangan transmigrasi saat ini tidak hanya pemerataan jumlah penduduk, namun juga menjadi bagian integral dari pembangunan daerah, dan penyelenggaraannya disesuaikan dengan karakteristik dan kondisi spesifik daerah, dan mengharuskan implementasi transmigrasi lebih berwawasan kultural dan kearifan lokal.

Peningkatan kerjasama yang harmonis antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam perencanaan kebijakan dan strategi pengembangan daerah transmigrasi, serta dengan masyarakat (pemangku adat dan tokoh masyarakat) setempat terkait penyediaan dan status kepemilikan lahan. Transmigrasi tidak lagi merupakan program pemindahan penduduk Indonesia, melainkan upaya untuk pengembangan wilayah. Metodenya tidak lagi bersifat sentralistik dan top down dari Kementerian, melainkan berdasarkan Kerjasama Antar Daerah pengirim transmigran dengan daerah tujuan transmigrasi. Penduduk setempat semakin diberi kesempatan besar untuk menjadi transmigran penduduk setempat (TPS), proporsinya (50:50) dengan transmigran Penduduk Asal (TPA).

Program dan pembangunan transmigrasi harus terus ditingkatkan, sebab transmigrasi selain untuk mensejahterakan masyarakat juga sebagai sabuk pengaman Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Demikian dikatakan

Dirjen Pembinaan Pembangunan Kawasan Transmigrasi (P2KTrans), Jamaluddien Malik (2014), bahwa, kalau pulau-pulau terdepan (terluar) Indonesia kosong alias tidak ada penghuninya, maka pulau itu akan mudah diklaim orang dari negara lain. Oleh karena itu, pelaksanaan transmigrasi sangat penting artinya, yakni memindahkan penduduk dari Jawa dan daerah lain yang padat penduduknya ke pulau-pulau atau daerah terluar Indonesia, seperti di Kalimantan atau Sumatera yang berbatasan dengan Malaysia, atau di Papua yang berbatasan dengan Papua Nugini. Perpindahan penduduk seperti itu tentu berjalan seiring dengan pembangunan ekonomi, terutama dalam membangun perkebunan dan industri di lokasi transmigrasi. Untuk itulah, Kemnakertrans terus berkoordinasi dengan kementerian terkait, seperti Kementerian Koperasi dan UMKM untuk menghidupkan usaha mikro, kecil dan menengah di daerah transmigrasi, juga dengan Kementerian Perindustrian (Kemenperin) untuk membangun industri hilir (pengolahan) di lokasi transmigrasi. Sedangkan berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian untuk melatih dan mendidik masyarakat transmigrasi bagaimana bertani yang bagus. Transmigrasi juga menjadi solusi bagi pembangunan Negara Kesatuan Republik Indonesia, karena itu usulan visi transmigrasi kedepan adalah menjadikan transmigrasi memiliki keunggulan wilayah dan masyarakat di kawasan transmigrasi yang harmonis, tangguh dan sejahtera. Reorientasi konsepnya transformasinya ke *voluntary migration* atau migrasi sukarela dengan berinsip *cultural harmony* yaitu menjaga keharmonisan budaya, serta mengarah pada pemenuhan kebutuhan, *demand driven*.

Keberhasilan program transmigrasi ditentukan oleh 3 aspek, yaitu :a) permukiman transmigrasi yang memenuhi kriteria *Clear and Clean (2C)*, *Layak Huni*, *Layak Usaha* dan *Layak Berkembang (3L)*; b) transmigran yang berkualitas dari aspek kompetensi, mental dan daya juang; c) pembinaan dan pengembangan kapasitas masyarakat transmigran yang sesuai dengan potensi kondisi setempat (Marwan Jafar (2015) dalam artikel liputan6.com). Ketiga aspek ini perlu diperhatikan untuk mencapai keberlanjutan pelaksanaan program transmigrasi. Dari ketiga aspek tersebut, aspek permukiman transmigrasi harus berada di lahan

yang Clear and Clean serta Layak Huni, Layak Usaha dan Layak Berkembang, ditambah perlu terpenuhinya Layak Lingkungan (4L), merupakan aspek mutlak yang perlu dipenuhi sejak awal perencanaan pembangunan permukiman transmigrasi. Bila sejak awal perencanaan tidak memenuhi kriteria tersebut, maka seharusnya tidak bisadilanjutkan kegiatannya karena akan menimbulkan permasalahan di kemudian hari dan tidak tercapainya pembangunan berkelanjutan.

Gambar 1.

Kondisi Pemukiman Trasmigrasi Di Indonesia



Gambar 2.

Pemukiman transmigrasi yang baru ditempati



Secara umum pelaksanaan transmigrasi telah menunjukkan keberhasilan dalam berbagai pembangunan. Namun, di balik keberhasilan tersebut, berbagai stigma negatif melekat pada program transmigrasi. Menurut Manuwiyoto (2004), transmigrasi dicap sebagai program sentralistik, pemindahan kemiskinan, deforestasi, jwanisasi, dan pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Terkait dengan stigma negatif ini, Siswono (2003) juga mengemukakan beberapa aspek yang menyebabkan terpuruknya citra program transmigrasi yang bermuara pada penolakan di berbagai daerah, di antaranya adalah :

- (a) Terlalu berpihaknya kepada etnis pendatang (transmigran) dalam pemberdayaan dan pembinaan masyarakat di unit pemukiman transmigrasi (UPT) dan kurang memperhatikan penduduk sekitar. Perbedaan ini, mengakibatkan perkembangan UPT relatif lebih cepat ketimbang desa-desa sekitarnya sehingga menimbulkan kecemburuan yang berdampak sangat rentan terhadap konflik;
- (b) Sistem pemberdayaan dan pembinaan masyarakat transmigrasi dilaksanakan dengan pendekatan sentralistik, yang mengakibatkan budaya lokal nyaris tidak berkembang, sementara budaya pendatang lebih mendominasi; proses perencanaan kawasan permukiman transmigrasi kurang dikomunikasikan dengan masyarakat sekitar. Akibatnya, masyarakat sekitar permukiman transmigrasi tidak merasa terlibat, dan karenanya tidak ikut bertanggung jawab atas keberadaannya;
- (d) Adanya pembangunan permukiman transmigrasi yang eksklusif sehingga dirasakan kurang adanya keterkaitan secara fungsional dengan lingkungan sekitarnya;
- (e) Adanya pemukiman transmigrasi yang tidak layak huni, layak usaha dan layak berkembang dan justru menjadi desa tertinggal.

Berdasarkan dari permasalahan diatas, maka dilaksanakannya pengabdian kepada masyarakat tentang Transmigrasi Sebagai Upaya Pertanian

METODE

Tujuan, kegiatan penyuluhan adalah untuk memberikan informasi dan sosialisasi tentang adanya program transmigrasi, informasi gambaran lokasi, persyaratan calon transmigrasi, hak-hak transmigrasi, kewajiban transmigrasi dan larangan transmigrasi. Adanya program transmigrasi diharapkan dapat menjangkit minat masyarakat yang ingin meningkatkan antara hidup dan kemandirian di lokasi penempatan transmigrasi.

Lokasi penyuluhan di Desa Kotadaro Kecamatan Rantau Panjang Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan. Teknik penyuluhan secara persuasive dengan metode ceramah dan sosialisasi mengenai transmigrasi. Kegiatan ini di lakukan di Balai penyuluhan yang ada di Desa Kotadaro dan jumlah peserta penyuluhan sebanyak 20 Kepala Keluarga yang mewakili dari beberapa pemukiman. Adapun peserta penyuluhan transmigrasi adalah dari tokoh masyarakat,, RW, RT, PKK serta warga rentan miskin yang menjadi sasaran program transmigrasi. Kegiatan ini dilaksanakan selama 3 hari dari tanggal 8 sampai dengan 10 Agustus 2022

PEMBAHASAN

Yudohusodo (1998), juga mengakui bahwa penyelenggaraan program transmigrasi menghadapi banyak kendala yang berpotensi menimbulkan baik masalah baru maupun dapat menimbulkan kerawanan dan kegagalan yang dapat mendatangkan risiko tidak kecil. Selanjutnya disebutkan pula bahwa ada tiga kendala utama dalam penyelenggaraan program transmigrasi, yaitu :

- (1) Kendala struktural, berupa lemahnya organisasi, sumber daya aparat dan masalah-masalah lain yang berkaitan dengan integrasi dan sinkronisasi, baik dengan program-program sektor lain,
- (2) Kendala substansial yang berkaitan dengan kebutuhan agar pembangunan transmigrasi ikut memantapkan pembangunan nasional meskipun anggaran terbatas dan
- (3) Kendala teknis operasional, yang disebabkan oleh kompleks masalah pembangunan transmigrasi, antara lain kurang tepat pemilihan lokasi,

ketidaktelitian dalam studi kelayakan, kurang sesuai penataan ruang dan pola usaha, kurang terpadu program antar sektor dan antar kegiatan pembangunan.

Menurut Kementerian Perindustrian (Kemperin) untuk membangun industri hilir (pengolahan) di lokasi transmigrasi, atau berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian (Kemtan) untuk melatih dan mendidik masyarakat transmigrasi bagaimana bertani yang bagus. Wakil Menteri Perindustrian, Alex W Retraubun menyatakan, Kemperin akan berkoordinasi dengan pengusaha Indonesia termasuk dengan investor asing, untuk membangun industri hilir kelapa sawit, cokelat, juga kopi, di daerah-daerah perbatasan dengan negara lain, terutama di Kalimantan yang berbatasan dengan Malaysia. Alex merasa prihatin, dengan banyaknya masyarakat Indonesia di perbatasan yang harus menjadi pekerja di industri hilir Malaysia karena tidak adanya pembangunan industri hilir di daerah Indonesia sendiri. " Kita malu dan prihatin dengan kenyataan seperti ini".Indonesia merupakan kepulauan yang berpenduduk heterogen, dengan persebaran yang tidak merata. Untuk mengatasi persoalan ketimpangan tersebut, maka pemerintah harus meningkatkan mobilitas penduduk sebagai tenaga kerja. Dalam hal ini, ekstensifikasi pertanian misalnya, bisa dilaksanakan di permukiman transmigrasi yang baru (PTB), sedangkan upaya intensifikasi pertanian dilakukan di permukiman transmigrasi yang ada (PTA).Melalui program transmigrasi diharapkan tumbuhnya kerja sama yang saling menguntungkan antara masyarakat transmigran dan masyarakat yang ada di sekitar lokasi pemukiman transmigran, khususnya di luar Jawa yang dapat menjamin peningkatan taraf hidup masyarakat di sekitarnya (Heeren, 2006).

Mobilitas penduduk merupakan upaya untuk mensinergikan dua potensi sumber daya produktif yaitu Sumber Daya Manusia (SDM) yang merupakan unggulan daerah asal transmigran, dan sumber daya alam (SDA) sebagai unggulan daerah penempatan transmigrasi. "Upaya tersebut sampai saat ini dirasakan masih belum optimal.Untuk itu, Kemnakertrans mengambil langkah-langkah revitalisasi ketransmigrasian, melalui refocusing penyelenggaraan transmigrasi dan

optimalisasi peran serta masyarakat. Langkah ini untuk membangun pusat-pusat pertumbuhan baru melalui penciptaan sentra-sentra produksi baru yang terintegrasi di kawasan transmigrasi. Mobilitas penduduk merupakan upaya untuk mensinergikan dua potensi sumber daya produktif, yaitu Sumber Daya Manusia yang merupakan unggulan daerah asal transmigran, serta sumber daya alam sebagai unggulan daerah penempatan transmigrasi.

Secara filosofis suatu proses pembangunan dapat diartikan sebagai upaya yang sistematis dan berkesinambungan untuk menciptakan keadaan yang dapat menyediakan berbagai alternatif yang sah bagi pencapaian aspirasi setiap warga yang paling humanistik. Istilah pembangunan seringkali digunakan dalam hal yang sama dengan pengembangan, sehingga dapat saling dipertukarkan. Namun berbeza di Indonesia cenderung menggunakan secara khusus istilah pengembangan untuk beberapa hal yang spesifik. Meski demikian, sebenarnya secara umum kedua istilah tersebut diartikan secara tidak berbeda untuk proses-proses yang selama ini secara universal dimaksudkan sebagai pembangunan atau *development* (Rustiadi dkk, 2009). Pembangunan Kawasan tidak lain adalah usaha untuk mengembangkan dan meningkatkan kesalingtergantungan dan interaksi antara sistem ekonomi (*economic system*), manusia atau masyarakat (*social system*), dan lingkungan hidup beserta sumber daya alam (*ecosystem*) yang ada di dalamnya.

Agropolitan merupakan salah satu pendekatan pembangunan yang relevan dengan wilayah perdesaan karena pada umumnya sektor pertanian dan pengelolaan sumber daya alam memang merupakan mata pencaharian utama bagi sebagian besar masyarakat perdesaan. Agropolitan terdiri dari kata "agro" = pertanian dan "politan" = kota, sehingga agropolitan dapat diartikan sebagai kota pertanian atau kota di daerah lahan pertanian (Departemen pertanian, 2002 dalam Pranoto, 2005). Selanjutnya Mercado (2002), mengemukakan bahwa gambaran agropolitan adalah sebagai berikut: 1) skala geografi relatif kecil; 2) Proses perencanaan dan pengambilan keputusan berdasarkan partisipasi dan aksi kooperatif pada tingkat lokal; 3) diversifikasi tenaga lokal termasuk pertanian

dan kegiatan non-pertanian; 4) pemanfaatan teknologi dan sumberdaya lokal; 5) Berfungsi sebagai *urban-rural* industrial.

Perencanaan hingga pengembangan kawasan transmigrasi memerhatikan kelayakan lokasi transmigrasi yang menjadi faktor penentu keberhasilan program transmigrasi berdasarkan kriteria 4L tersebut. Kelayakan lokasi berarti bahwa keberlangsungan kehidupan penghuni (transmigran), keberlanjutan lingkungan dan pengembangan wilayah. Layak huni dapat dilihat dari beberapa aspek antara lain aspek kerawanan bencana, aspek kesehatan, aspek penyediaan air bersih, aspek ketersediaannya prasarana transportasi yang mudah dan memungkinkan terjadinya hubungan dengan daerah sekitarnya, dan aspek ketersediaan fasilitas umum. Layak usaha dinilai atas dasar tersedianya lahan pertanian atau peluang usaha yang memenuhi syarat untuk kegiatan produksi, tersedianya sarana dan prasaran produksi pengelolaan yang diperlukan, dan tersedianya prasarana jalan yang menghubungkan antar lokasi permukiman maupun dengan pusat pemasaran. Layak berkembang dilihat dari mempunyai daya tampung besar, memiliki akses antar unit-unit permukiman serta dengan pusat pemerintahan dan pasar, adanya kontribusi terhadap pengembangan daerah, adanya komoditas unggulan berskala ekonomi dan memiliki keterkaitan ekonomi antar kawasan dengan pusat-pusat pemasaran yang lebih tinggi. Layak lingkungan dilihat dari dampak yang ditimbulkan dari pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi, baik kepada kondisi fisik lingkungan, sosial, ekonomi, maupun budaya

Gambar 3.

Pemukimana Transmigrasi



Gambar 4.

Lahan Pemukiman Untuk Tanaman Pangan



Gambar 5.

Lahan sawah untuk tanaman padi



Gambar 6.

Pemukiman transmigrasi berbagai komoditi



Pada kondisi ini yang berperan sebagai pendorong konflik dalam pembangunan transmigrasi yaitu:

1. Setiap wilayah pengembangan transmigrasi sifatnya unik (wilayah yang satu tidak sama karakteristiknya dengan wilayah lainnya), baik fisik, klimatologi, sosial maupun budaya. Sehingga dibutuhkan studi mendalam untuk membuat program transmigrasi dapat berjalan dengan baik.
2. Masih rendahnya pengetahuan transmigran terhadap daerah barunya, baik dari aspek ketrampilan maupun dari adaptasi budaya dengan daerah barunya atau masyarakat lokal.

Strategi yang dapat dilakukan, untuk pencegahan konflik berkaitan dengan spesifikasi di daerah penerima transmigrasi dan berkembangnya, diarahkan pada dua tahap sebagai berikut: (Pursudi Suparlan, 1997)

a. Persiapan

1. Penentuan lokasi transmigrasi dan calon transmigran berdasarkan penelitian. Pemerintah perlu bekerjasama dengan Perguruan Tinggi setempat dalam menangani suatu persiapan program.
2. Kerja sama pemerintah daerah penerima dalam memberikan pemahaman pada calon transmigran tentang lingkungan dan masyarakat yang daerahnya dijadikan lokasi transmigrasi
3. Memberi pengetahuan dan pemahaman kepada masyarakat asli lokal) yang daerahnya akan dijadikan lokasi transmigrasi.
4. Sebaiknya dilakukan penelitian yang memadai mengenai lokasi yang dituju sebagai kawasan pemukiman apakah layak atau tidak.
5. Studi perencanaan teknis pemukiman dengan melibatkan masyarakat lokal pemilik tanah yang akan dijadikan lokasi transmigrasi.

b. Pelaksanaan

1. Memberikan pendidikan serta pelatihan untuk pengembangan lahan usaha kepada transmigran dan penduduk lokal.
2. Penempatan disesuaikan dengan pola pemukiman penduduk asli atau berada di antara atau berada bersama-sama dengan penduduk asli, agar

menghindari perbedaan permukiman secara menyolok sehingga orang asli merasa memiliki program transmigrasi itu.

Penyelenggaraan transmigrasi melalui dua tahap ini, mengacu pada segala sesuatu yang berkaitan penyiapan pemukiman yang layak huni, layak usaha dan layak berkembang. Begitu pula pengarahan, penempatan dan pembinaan masyarakat transmigrasi serta pembinaan lingkungan pemukiman transmigrasi sampai dengan penyerahannya kepada pemerintah daerah perlu dilakukan pendekatan-pendekatan yang dirasa perlu segera mendapatkan perhatian khusus : (1) desentralisasi, yaitu peningkatan peran pemerintah daerah; (2) *demand*, mengacu pada penyerahan dan penempatan; (3) partisipasi masyarakat, mengacu pada peran aktif masyarakat; (4) target fisik dan non fisik; (5) pola usaha dan (6) informatif. Untuk itu, keputusan mau tidaknya bertransmigrasi, hendaknya tetap berada pada masyarakat baik sebagai individu atau kelompok tanpa suatu paksaan. Oleh karena itu daerah tujuan dan prospek pengembangannya akan memegang peranan penting dalam meningkatkan peran serta masyarakat pada program transmigrasi.

Transmigrasi secara nyata telah menunjukkan peran yang penting dalam pengembangan wilayah, khususnya daerah-daerah di luar Pulau Jawa. Dalam pelaksanaannya selama ini, program transmigrasi telah berhasil mengembangkan sekitar 3.000-an. Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT) dengan berbagai infrastrukturnya, 945 diantaranya telah berkembang menjadi desa baru. Desa-desa baru tersebut sekarang dihuni oleh kurang lebih 12 juta jiwa dan telah tumbuh mendorong terbentuknya kecamatan dan kabupaten baru. Data eks UPT yang telah mendorong perkembangan daerah menjadi pusat pemerintahan sebanyak 240 kecamatan dan 88 kabupaten. (Pusdatintrans dan P4Trans, 2009). Beberapa diantara kawasan transmigrasi seperti Kurotidur di Bengkulu Utara, Metro di Lampung, Sangkala di Kalimantan Timur bahkan di tetapkan sebagai kawasan Agropolitan. Lokasi yang demikian biasanya menjadi daya tarik transmigran swakarsa yang memiliki bekal dan keterampilan sejak dari daerah asal. Dalam hal pengembangan akses terhadap faktor-faktor produksi,

transmigrasi telah membangun sarana fisik transportasi berupa jalan, jembatan, gorong-gorong dan saluran drainase yang telah membuka isolasi wilayah yang selama ini tidak tersentuh pertumbuhan. Menurut Bank Dunia (1986), transmigrasi memberikan sumbangan pada perluasan jaringan jalan di beberapa provinsi, dengan besaran sekitar 20 persen di kepulauan luar Jawa, Madura dan Bali dan bahkan mencapai 50 persen di empat provinsi yaitu Lampung, Kalbar, Kalteng dan Kaltim. Perluasan jaringan jalan tersebut berupa jalan masuk ke permukiman transmigrasi. Sekitar 3.000-an Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT) dengan berbagai infrastrukturnya, 945 diantaranya telah berkembang menjadi desa baru, yang sekarang dihuni oleh kurang lebih 12 juta jiwa dan telah tumbuh mendorong terbentuknya kecamatan dan kabupaten baru. Data eks UPT yang telah mendorong perkembangan daerah menjadi pusat pemerintahan sebanyak 240 kecamatan dan 88 kabupaten. (Pusdatintrans dan P4Trans, 2009). Beberapa di antara kawasan transmigrasi seperti Kurotidur di Bengkulu Utara, Metro di Lampung, Sangkala di Kalimantan Timur bahkan ditetapkan sebagai kawasan Agropolitan. Lokasi yang demikian biasanya menjadi daya tarik transmigran swakarsa yang memiliki bekal dan keterampilan sejak dari daerah asal.

Upaya tersebut sampai saat ini dirasakan masih belum optimal, untuk itu Kemnakertrans mengambil langkah-langkah revitalisasi ketransmigrasian, melalui refocusing penyelenggaraan transmigrasi dan optimalisasi peran serta masyarakat. Langkah ini untuk membangun pusat-pusat pertumbuhan baru, melalui penciptaan sentra-sentra produksi baru yang terintegrasi di kawasan transmigrasi. Transmigrasi telah memberikan kontribusi nyata dalam pembangunan pertanian dengan menciptakan lahan pertanian baru. Pada tahun 2012, sedikitnya 37 kawasan telah berkembang menjadi sentra produksi pangan dan memberikan kontribusi terhadap produksi beras nasional sebesar 8,4 juta ton. Direktur Partisipasi Masyarakat Ditjen P2KT Kemenakertrans Conrad Hendarto menyatakan perluasan areal pertanaman sebagai sentra produksi pertanian baru pada dasarnya merupakan upaya redistribusi lahan untuk meningkatkan skala usaha pertanian bagi petani agar mencapai skala ekonomis. Perluasan areal lahan

pertanian merupakan upaya untuk menggali potensi sumberdaya lokal seoptimal mungkin sehingga mampu memberikan kontribusi terhadap ketahanan pangan nasional. Untuk itu, peran investasi dalam pembangunan kawasan transmigrasi mutlak diperlukan karena melalui kerjasama investasi ini telah terbukti mempercepat pembangunan kawasan tersebut. Berdasarkan data kementeriannya, hingga Maret 2013 tercatat 34 perusahaan yang bekerjasama kemitraan melalui pola inti-plasma dengan transmigran dan masyarakat sekitar dalam mekanisme Izin Pelaksanaan Transmigrasi (IPT), dengan nilai investasi mencapai Rp9,5 triliun.

Program Tranmigrasi Prioritas Pada Desa Dan Masyarakat Setempat

Pengembangan kawasan transmigrasi dapat berasal dari areal yang sama sekali masih bebas, namun dapat pula berdekatan dengan desa sekitar. Kepada masyarakat sekitarnya dapat diikut sertakan dalam program transmigrasi melalui pengikut sertaan sebagai transmigran, atau dalam bentuk pemberian bantuan pemberdayaan kepada masyarakat desa yang ada. Penyertaan masyarakat desa sekitar kedalam program transmigrasi diarahkan pada mereka yang belum memiliki lahan, sehingga dengan keikut sertaan dalam program transmigrasi dapat memiliki faktor-faktor produksi yang dapat memberikan sumber pendapatan. Bagi desa sekitar yang menjadi bagian dari suatu kawasan transmigrasi dapat diberikan bantuan pemberdayaan masyarakat desa, tanpa harus pindah dari desanya kepermukaan baru. Bantuan pemberdayaan dapat berupa infrastruktur fisik maupun sarana usaha produktif untuk memberikan peluang peningkatan usaha ekonominya. Penyelenggaraan transmigrasi hanya ada di Indonesia dan sangat relevan menjadi solusi bagi pembangunan NKRI. Visi transmigrasi kedepan adalah menjadikan transmigrasi memiliki keunggulan wilayah dan masyarakat di kawasan transmigrasi yang harmonis, tangguh dan sejahtera. Reorientasi konsep transformasinya ke perpindahan sukarela dengan berpinsip menjaga keharmonisan budaya, serta mengarah pada pemenuhan kebutuhan hidup guna meningkatkan kesejahteraan transmigran dan masyarakat sekitar. Anharudin dkk

(2006). juga mengemukakan, meskipun program transmigrasi telah berhasil membangun desa-desa baru, namun sebagian di antaranya belum sepenuhnya mampu mencapai tingkat perkembangan secara optimal, yang mampu menopang pengembangan wilayah, baik wilayah itu sendiri atau wilayah lain yang sudah ada. Bahkan menurut Haryati dkk (2006), sebagian dari permukiman transmigrasi tersebut direlokasi karena kondisinya dinilai tidak layak untuk berkembang. Distribusinya masih terkonsentrasi di Pulau Jawa yaitu sebesar 58 persen, yang diikuti oleh pulau Sumatra sebesar 21 persen. Selanjutnya untuk pulau-pulau/kelompok kepulauan lain berturut-turut adalah sebagai berikut: Sulawesi 7 persen, Kalimantan 6 persen, Bali dan Nusa Tenggara 6 persen, Maluku dan Papua 3 persen (BPS, 2010). Sebagian besar (hampir 60 persen) penduduknya tinggal di Pulau Jawa dan Madura, sedangkan luasnya hanya 7% dari luas wilayah Indonesia. Selain kepadatan penduduk, penyebaran penduduk juga tidak merata. Misalnya Pulau Jawa yang terdiri dari Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DI Yogyakarta, DKI Jakarta dan Banten yang luasnya 6,77 dihuni oleh 57,44 persen penduduk pada tahun 2010.

Menurut Yudohusodo (1998) ada empat sasaran utama pembangunan pemukiman transmigrasi, yaitu: Pertama, Membangun desa-desa baru melalui pembangunan unit-unit pemukiman transmigrasi yang terintegrasi dalam satuan kawasan pembangunan (SKP) dan wilayah Pengembangan Parsial (WPP); Kedua, Membangun hinterland dari pusat-pusat pertumbuhan yang ada melalui pembangunan unit-unit permukiman transmigrasi dengan pusat-pusat pertumbuhan tersebut. Ketiga, Mendorong pertumbuhan desa-desa yang kurang berkembang melalui penambahan penduduk dan pembangunan prasarana, yang disebut Transmigrasi Swakarsa Pengembangan Desa Potensial (Transabangdep); dan Keempat, Membangun masyarakat transmigrasi dan penduduk di sekitarnya melalui pengembangan keswasembadaan masyarakat, agar pada saat pembinaan UPT diserahkan kepada pemerintah daerah, masyarakat telah mandiri.

Perubahan Peran Pemerintah Pusat Beralih Dari Sifat Direktif Menjadi Akomodatif

Peran pemerintah pusat pada waktu yang lalu selalu memberikan arahan dan petunjuk kepadatan daerah tentang apa yang sebaiknya dilakukan dan bagaimana mengerjakannya. Selanjutnya dari perangkat aparatur daerah meneruskan hal yang sama kepada masyarakat kawasan transmigrasi. Dengan demikian proses penyelenggaraan transmigrasi bersifat sangat sentralistik, direktif, dan top-down. Terlepas dari beberapa kelebihanannya, metoda tersebut mengandung banyak kelemahan. Antara lain terletak pada lemahnya inisiatif, motivasi, kreativitas dan inovasi para penyelenggara program transmigrasi. Sebagai akibatnya, penyelenggaraan program transmigrasi tidak berkembang secara dinamis. Kedepan, pemerintah pusat lebih banyak menyerahkan kewenangan kepada daerah dan seterusnya dari perangkat daerah kepada masyarakat di kawasan transmigrasi, sehingga sifatnya lebih desentralistik. Keinginan masyarakat di kawasan transmigrasi diakomodir melalui proses bottom-up. Proses pemberian wewenang dan kepercayaan kepada masyarakat tersebut menumbuhkan rasa percaya diri di lingkungan masyarakat di kawasan transmigrasi. Dengan proses demikian diharapkan terjadi peningkatan motivasi, kreativitas, dan inovasi para penyelenggara program Transmigrasi yang pada gilirannya mendinamisir proses penyelenggaraan transmigrasi.

Setelah otonomi daerah, pada dasarnya sudah ada pergeseran paradigma transmigrasi yang eksklusif ke paradigma inklusif, atau secara konseptual melibatkan masyarakat desa-desa sekitar sebagai bagian dari kawasan transmigrasi. Sebagaimana yang dinyatakan dalam UU No. 15 Tahun 1997, PP No. 2 Tahun 1999 dan UU No. 29 Tahun 2009, lingkup geografis kawasan transmigrasi terdiri dari permukiman baru transmigrasi, desa- desa eks transmigrasi dan desa-desa setempat. Namun secara praktis masih ada keterpisahan antara masyarakat transmigrasi yang berada di dalam unit permukiman yang dibangun secara terkonsentrasi dengan masyarakat sekitar atau setempat yang berada di luar unit. Keterpisahan bukan saja secara konseptual, tetapi juga terwujud dalam bentuk-

bentuk perlakuan, program dan input (pemberian), yang bias ke warga yang di dalam unit permukiman transmigrasi. Yudohusodo (1998) juga mengakui bahwa penyelenggaraan program transmigrasi menghadapi banyak kendala yang berpotensi menimbulkan baik masalah baru maupun dapat menimbulkan kerawanan dan kegagalan yang dapat mendatangkan risiko tidak kecil.

Kesimpulan

Pada dasarnya sebagian terbesar transmigrasi berawal dari kondisi sikap ketidak berdayaan, ketergantungan, dan ketidak mampuan, faktor yang masih menguntungkan adalah bahwa kebanyakan diantara mereka masih mempunyai motivasi untuk memperbaiki kehidupannya. Oleh karena itu, pembinaan masyarakat harus diarahkan pada berkurangnya sikap ketergantungan dan kemanjaan. Pembinaan perlu diarahkan pada tumbuhnya budaya kreatif, inovatif, partisipasif dan kemandirian. Dari aspek pertanian, kawasan transmigrasi telah menjadi sentra produksi pangan, perkebunan dan agribisnis. Diberbagai daerah tujuan transmigrasi, baik di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua, kawasan transmigrasi menjadi sentra produksi pangan, perkebunan seperti sawit dan karet dan agribisnis. Di Sumatera, Belitang, Karang Agung, Mesuji dan Rawa Pitu menjadi lumbung padi. Di Papua seperti Tanah Miring dan Arso, menjadi sentra penghasil padi dan perkebunan. Demikian pula sentra perkebunan sawit, seperti Sungai Bahar Jambi, Arga Makmur Bengkulu, Parenggean Kalimantan, berasal dari permukiman transmigrasi. Sementara itu, penduduk desa sekitar masih terabaikan, berbagai isu-isu mendasar tersebut merupakan kendala yang dihadapi dalam mewujudkan transmigrasi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi. Isu-isu tersebut juga menjadi faktor utama menurunnya kinerja transmigrasi sejak era otonomi daerah, karena sebagian daerah tidak lagi menempatkan program transmigrasi sebagai kebijakan prioritas.

Pertambahan penduduk yang selalu meningkat, perubahan orientasi dalam meingkatkan setiap tahun akan menimbulkan permasalahan terkait dengan keterbatasan atau berkurangnya lahan serta meningkatnya kemiskinan.

Pemerintah telah berupaya untuk mengurangkan jumlah penduduk di wilayah padat melalui program transmigrasi (Prihatin, 2013). Mengingat program transmigrasi sangat penting untuk mengatasi permasalahan kependudukan dan meningkatkan kesejahteraan, maka sudah selayaknya program ini dipertahankan dan dikembangkan. Keberhasilan program transmigrasi pada masa lalu dapat dijadikan contoh untuk pengembangan program ini di masa yang akan datang (Prihatin, 2012). Pada sisi lain, kegagalan program ini juga banyak menimbulkan kritik. Misalnya kritik tersebut bahwa program transmigrasi tidak lebih sekedar memindahkan kemiskinan dan bukan untuk menyejahterakan penduduk. Tampaknya memang perlu dilakukan perubahan orientasi dalam meningkatkan program transmigrasi yaitu melalui peningkatan pembangunan daerah khususnya daerah-daerah di luar pulau Jawa-Bali untuk kepentingan pembangunan nasional (Nitiyasa dan Sudibia 2013).

Kebijakan transmigrasi yang berorientasi pada pembangunan daerah pada hakekatnya akan menempatkan kepentingan-kepentingan nasional di dalam perspektif dan kepentingan-kepentingan daerah dengan otonomiyang kuat di daerah, maka ada tiga langkah kebijakan yang harus dikerjakan, yaitu : (1) mengontrol arus masuk transmigran dalam jumlah karakter sosial ekonomi dan budayanya, agar tidak melampaui ambang batas daya dukung sosial yang dapat menjadi potensi konflik antara transmigran dengan penduduk setempat; (2) melakukan pengelompokan-pengelompokan transmigran yang terpadu dari berbagai kelompok etnis serta mempersiapkan sejumlah transmigran terampil fungsional dalam setiap kelompok dan lokasi transmigrasi, serta mendorong mereka untuk beradaptasi dengan penduduk setempat; dan (3) merencanakan pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, puskesmas, lapangan olah raga, dan lain-lain yang tidak terkesan eksklusif untuk lokasi transmigrasi tertentu sebagai bagian dari indeks pembangunan manusia.

Transmigran di daerah berperan :

1. Pemerintah berharap bahwa penempatan transmigran umum akan membuat komposisi penduduk menjadi heterogen sehingga menjadikan masyarakat lokal lebih dihargai dan mau mengikuti program yang ditawarkan.
2. Transmigrasi umum menjadi *agent of technological innovation* bagi masyarakat lokal, sehingga proses alih teknologi dapat berlangsung dengan baik.
3. Transmigrasi lokal bisa mencontoh teknologi bertani dari transmigran pendatang.

Daftar Pustaka

- Andriati, Ratna Dewi. 2019. Pusdatintrans dan Penyusunan Pelaksanaan Persiapan Permukiman Transmigrasi. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
- Anharudin, dkk. 2006. *Membidik Arah Kebijakan Transmigrasi Pasca Reformasi*. Pusat Penelitian dan Pengembangan Ketransmigrasian Departemen TenagaKerja dan Transmigrasi. Jakarta.
- Badan Pusat Statistik (BPS). 2010. Hasil Sensus Penduduk 2010. Jakarta [ID]: [Internet]. [Diunduh 201917 Agustus]. Tersedia pada: <https://uzairsuhaimi.files.wordpress.com/2011/06/data-sensuspenduduk-2010.pdf>.
- Bank Dunia. 1986. *Indonesia Transmigration Sector Review*. BankDunia.Washington D.C.
- Direktorat Bina Potensi Kawasan Transmigrasi 2015. Ditjen Penyiapan Kawasan Dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
- Direktorat Pengembangan Kawasan Ditjen Penataan Ruang Departemen Pemukiman dan Prasarana Wilayah. 2002. "Pendekatan dan Program Pengembangan Wilayah". Bulletin Kawasan Edisi 2. Direktorat Pengembangan Kawasan Khusus dan Tertinggal, Deputi tonomi Daerah dan Pengembangan Regional BAPPENAS. Jakarta
- Haryati, dkk. 2006. Studi Pembangunan Pusat Pertumbuhan. Pusat Penelitian dan Pengembangan Ketransmigrasian Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Jakarta

- Heeren, H. J. 2000. Transmigrasi di Indonesia. Gramedia. Jakarta.
- Jamaluddien Malik . 2014. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 307 Tahun 2014.<http://www.beritasatu.com/nasional/104609-transmigrasi-disebut-sebagai-sabuk-pengaman-nkri.html>
- Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. 2014. <http://bto.depnakertrans.go.id/index.php>. Diakses tanggal 20 Maret 2014.
- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI. 2015. Transmigrasi Masa Dolo, Kini dan Harapan Kedepan
- Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. 2014. <http://bto.depnakertrans.go.id/index.php>. Diakses tanggal 20 Maret 2019.
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 tahun 1978 tentang Pembentukan Badan Koordinasi Penyelenggaraan Transmigrasi.
- Manuwiyoto, Mirwanto. 2004. Mengenal dan memahami transmigrasi. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan
- Mercado, R.G. 2002. Regional Development in The Philippine: A Review of Experience, State of The Art and Agenda for Research and Action, Discussion Paper Series. Phillipine Institute for Development Studies.
- Montgomery, M. R. 1988. How Large is too Large? Implication of the City Size Literature for Population Policy and Research, Economic Development and Cultural Change, 36: 691-720.
- Nitiyasa IG, Sudibia IK. 2013. Menggalakkan Program Transmigrasi Melalui Pembangunan Dearah. Jurnal Kependudukan. Vol. 9 No. 1. ISSN: 1907-3275.
- Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Transmigrasi
- Phillipine Institute for Development Studies.Mills, Edwin S. and Hamilton, Bruce W. 1989. *Urban Economic*. Harper Collin, theditio.
- Prihatin RB. 2013. Revitalisasi Program Transmigrasi. Jurnal Aspiral Vol. 4 No. 1. Juni 2013.
- Pranoto, Sugimin. 2005. "Pembangunan Pedesaan Berkelanjutan Melalui Model Pengembangan Agropolitan. Tesis S-2 Institut Pertanian Bogor. Tidak dipublikasikan.
- Pusdatintrans dan P4Trans, 2009. Transmigrasi dan Pengembangan Wilayah. <https://www.academia.edu>. Diakses 10 Juni 2018.
- R. Djoko Pranoto, 2005, Outsourcing Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Perspektif Pengusaha).

- Richard D. Irwin, Inc. Boston. Bradley, Rebecca & Gans, Joshua S. 1996. *Growth in Australian Cities*, the Economic Record, the Economic
- Rencana Pembangunan Jangka Panjang, 2010-2025. Bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian. Diakses dari Internet, 8 September 2014
- Retraubun, Alex W. 2014. <http://www.suarapembaruan.com/ekonomidanbisnis/pelaksanaan-transmigrasi-sabuk-pengaman-nkri>.
- Rustiadi, Erman dan S. Hadi. 2004. Pengembangan Agropolitan sebagai Strategi Pembangunan Perdesaan dan Pembangunan Berimbang (Makalah).
- Rustiadi, Ernan dkk. 2009. *Perencanaan dan Pengembangan Wilayah*. Crestpent Press dan Yayasan Obor Indonesia. Jakarta
- Rustiadi, 2011. *Transmigrasi dan Pembangunan Wilayah*. Gramedi. Jakarta.
- Rustiadi, Ernan dan Junaidi, 2011. *Transmigrasi dan Pengembangan Wilayah*. Makalah disampaikan dalam Rangka Penyempurnaan Konsep Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Transmigrasi, diselenggarakan oleh Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI di Jakarta, Februari 14, 2011.
- Setiawan N. 2006. Satu Abad Transmigrasi Di Indonesia: Perjalanan Sejarah Pelaksanaan, 1905-2005. Bandung (ID): [Internet]. [Diunduh 2017 Juni 03]. Tersedia pada: <http://pustaka.unpad.ac.id/archives/6704>.
- Siswono. 2003. *Konsep Transmigrasi*. Jakarta. PT. Tema baru. Society of Australia, Vol. 74
- Sugestiyadi, Bambang. 2013. [http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/MERUBAH PARADIGMA.Program Transmigrasi pdf](http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/MERUBAH_PARADIGMA.Program%20Transmigrasi.pdf)
- Sutarno. 2013. <http://industri.bisnis.com/read/20131006/99/167279/kawasan-transmigrasi-sumbang-84-juta-ton-produksi-beras>
- Sofyan, Fauzi, Ahmad. 2013. Pengaruh Transmigrasi terhadap Kehidupan Sosial Ekonomi masyarakat. Kutai timur : jurnal ilmu pemerintahan. Vol. 1, No.3 : 1167-1180
- Undang-undang No. 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian
- Yudohusodo, Siswono. 1998. *Transmigrasi: Kebutuhan Negara Kepulauan Berpenduduk Heterogen dengan Persebaran yang Timpang*. PT Jurnalindo Aksara Grafika. Jakarta.
- Washington D.C. Blair, J.P. 1991. *Urban and Regional Economics*.
- Workshop dan Seminar Nasional Pengembangan Agropolitan sebagai Strategi Pembangunan Perdesaan dan Wilayah secara Berimbang. Bogor